

LAPORAN KINERJA

Tahun 2023



BPPP BITUNG

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Tahun 2023 ini merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian BPPP Bitung berdasarkan target kinerja dan penggunaan anggaran pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 ini menggambarkan capaian kinerja yang telah diraih dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023.

Permasalahan dan kendala yang muncul pada Tahun 2023 menjadi perhatian sebagai antisipasi rencana untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Kami berharap dengan telah disusunnya laporan Kinerja Tahun 2023 ini akan diperoleh manfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPPP Bitung, sehingga masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada pelaporan kinerja periode selanjutnya.

Bitung, 14 Januari 2024



Natalia, S.St.Pi., M.Pi
NIP. 19801225 200502 2 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan SDM BPPP Bitung	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	4
1.6 Potensi dan Permasalahan	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Rencana Kegiatan Tahun 2023	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
2.4 Pengukuran Kinerja	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	20
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023	50
BAB IV. PENUTUP	56
4.1 Capaian Kinerja Utama	56
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	58

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. PNS BPPP Bitung berdasarkan Golongan	3
Tabel 2. PNS BPPP Bitung berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Tabel 3. PNS BPPP Bitung berdasarkan Kelompok Umum	4
Tabel 4. Rencana Kegiatan Tahun 2023	10
Tabel 5. Perjanjuan Kinerja BPPP Bitung Tahun 2023	13
Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPPP Bitung sd Tahun 2023.....	17
Tabel 7.IKSK.01.01. Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di DUDI	18
Tabel 8. Perbandingan realisasi persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP	19
Tabel 9.IKSK.01.02. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	21
Tabel 10. Perbandingan realisasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP	21
Tabel 11.IKSK.01.03. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung	22
Tabel 12. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP	23
Tabel 13. SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)	24
Tabel 14. Perbandingan realisasi SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	24
Tabel 15. Lulusan Pelatihan yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) (orang)	25
Tabel 16. Perbandingan realisasi Lulusan Pelatihan yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	26
Tabel 17. Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Bitung (Paket)	27
Tabel 18. Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Bitung (Paket) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	27
Tabel 19. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh (kelompok)	28

Tabel 20. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	29
Tabel 21. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (kelompok).....	30
Tabel 22. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	31
Tabel 23. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk (kelompok)	32
Tabel 24. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	33
Tabel 25. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPP Bitung (orang)	33
Tabel 26. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPP Bitung (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	34
Tabel 27. Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	35
Tabel 28. Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	35
Tabel 29. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar (unit)	36
Tabel 30. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar (unit) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	36
Tabel 31. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	37
Tabel 32. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	38
Tabel 33. Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju WilayahBebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	38
Tabel 34. Unit Kerja BPPP Bitung yang Dibangun untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	39
Tabel 35. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai)	39
Tabel 36. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	40
Tabel 37. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)	41

Tabel 38. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	42
Tabel 39. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	42
Tabel 40. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	43
Tabel 41. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung (%)	44
Tabel 42. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	45
Tabel 43. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	45
Tabel 44. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	46
Tabel 45. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	47
Tabel 46. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	47
Tabel 47. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	48
Tabel 48. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	48
Tabel 49. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)	49
Tabel 50. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	49
Tabel 51. Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023 BPPP Bitung	50
Tabel 52. Efisiensi Anggaran Per 31 Desember 2023 BPPP Bitung	52

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Bitung	3
Gambar 2. Indeks capaian IKU	15
Gambar 3. Skor Kinerja BPPP Bitung Tahun 2023.....	16
Gambar 4. Pendampingan dalam upaya menunjang keberhasilan kelompok	20
Gambar 5. Aplikasi yang digunakan untuk mengukur nilai kinerja anggaran	52
Gambar 6 . Nilai Kinerja Organisasi BPPP Bitung.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Perjanjian Kinerja BPPP Bitung	60
Surat Tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja	63
Publikasi LKJ Ke Website	67

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPPSDM KP sesuai dengan fungsinya melaksanakan 3 program utama, yaitu program pengembangan pendidikan KP, program pengembangan pelatihan KP dan program pengembangan penyuluhan KP. Dari 3 program utama tersebut BPPP Bitung sebagai salah satu UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala BPPSDM KP KP sesuai tugas dan fungsinya mendukung program pengembangan pelatihan dan penyuluhan yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya dalam pengelolaan kinerjanya, BPPP Bitung melakukan restrukturisasi SAKIP BPPP Bitung yang telah dapat meningkatkan efektifitas organisasi.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 masing-masing perspektif sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung tercapai sebesar 70,28% dari target yaitu 70% atau dengan persentase 100,40%;
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung sebanyak 3.130 orang dari target yaitu 2.980 orang atau dengan persentase 105,03%;
- Nilai PNBP Satker BPPP Bitung tercapai sebesar 0,42 Miliar Rupiah dari target yaitu sebesar 0,188 Miliar Rupiah atau dengan persentase 120%;

2. Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan:

- SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung tercapai sejumlah 108 orang dari target yaitu sebesar 90 orang atau dengan persentase 120%.

3. Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP:

- Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Bitung tercapai sejumlah 20 orang dari target yaitu 16 orang atau dengan persentase 120%;
- Materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Bitung tercapai sebanyak 2 paket dari target yaitu 2 paket atau dengan persentase 100%.

4. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Bitung sebanyak 3.450 kelompok dari target yaitu 3.450 kelompok atau dengan persentase 100%;

- Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung sebanyak 102 kelompok dari target yaitu 95 kelompok atau dengan persentase 107,37%;
 - Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung sebanyak 361 kelompok dari target sebesar 301 kelompok atau dengan persentase 119,93%;
 - Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung tercapai sejumlah 1070 orang dari target yaitu 1061 orang atau dengan persentase 100,85%.
5. Terselenggaranya percontohan penyuluhan KP:
- Desa/kawasan mitra yang menerapkan iptek KP lingkup BPPP Bitung (Desa Perikanan Cerdas) tercapai sejumlah 1 desa dari target sejumlah 1 desa atau dengan persentase 100%.
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan:
- Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Bitung tercapai sebanyak 2 unit dari target sejumlah 2 unit atau dengan persentase 100%.
7. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Bitung adalah sebagai berikut :
- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung tercapai 100% dari target yaitu 100% atau dengan persentase capaian 100%;
 - Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejumlah 1 satker dari target yaitu 1 satker atau dengan persentase capaian 100%;
 - Nilai rekonsiliasi kinerja BPPP Bitung senilai 93,98 dari target yaitu senilai 93 atau dengan persentase capaian 101,05%;
 - Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Bitung sebanyak 116,58% dari target 92% atau dengan persentase 127%;
 - Indeks profesionalitas ASN BPPP Bitung sebesar 83,14 dari target 77 atau dengan persentase capaian 107,97%;
 - Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2022 sebesar 0% dari target $\leq 0,5$ atau dengan persentase capaian 120%;
 - Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung yaitu 100% dari target 80% atau dengan persentase capaian 120%;
 - Nilai PM SAKIP BPPP Bitung tercapai sebesar 82,25 dari target sebesar 77 atau dengan persentase capaian 106,82%;
 - Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Bitung sebesar 95,96 dari target sebesar 93,75 atau dengan persentase capaian 102,36%;
 - Nilai kinerja anggaran BPPP Bitung sebesar 86,09 dari target sebesar 82 atau dengan persentase capaian 104,99%.

Penyelenggaraan program di BPPP Bitung secara umum telah terlaksana dengan baik dengan capaian sebesar 108.33% dan menghasilkan tingkat capaian seperti pada masing-masing sasaran kinerja di atas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan BPPP Bitung Tahun 2023. Capaian sasaran tahun 2023 ini merupakan kontribusi capaian atas 7 sasaran kegiatan dan 22 Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh BPPP Bitung. Secara umum kinerja BPPP Bitung sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari capaian ini, diharapkan kinerja di triwulan selanjutnya dapat lebih meningkat.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tahapan dalam siklus manajemen sebuah organisasi unsur pelaporan mempunyai peranan penting untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang telah dicapai dari tujuan dari organisasi itu sendiri. Unsur pelaporan semakin penting seiring dengan adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dalam rangka perwujudan *Good Governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Inpres tersebut, seluruh instansi pemerintah setiap tahun wajib menyampaikan laporan informasi kinerja kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

BPPP Bitung sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada atasannya. Penyampaian laporan kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis BPPP Bitung, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2023. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BPPP Bitung di masa yang akan datang.

1.2. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP setiap K/L wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 kepada Kepala BPPSDM KP melalui Kepala Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP. Penyusunan LKJ BPPP Bitung Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPPP Bitung kepada Kepala BPPSDM KP atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LKJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPPP Bitung selama Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, bahwa Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BPPP, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Menteri KP ini, terdapat 5 (lima) BPPP, salah satu diantaranya adalah BPPP Bitung. Selanjutnya setiap BPPP tersebut mempunyai tugas “melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan” dan dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPP kemudian menyelenggarakan sejumlah fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPPP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas masing-masing, sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Bitung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Struktur Organisasi di BPPP Bitung dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Bitung

1.4. Keragaan SDM BPPP Bitung

Jumlah keseluruhan pegawai BPPP Bitung sampai dengan 31 Desember 2023 BPPP Bitung sebanyak 423 orang, terdiri dari PNS 277 orang, 31 orang PPPK, 103 orang penyuluh perikanan bantu, dan tenaga kontrak 12 orang. PNS BPPP Bitung berdasarkan golongan disajikan pada Tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. PNS BPPP Bitung berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1	Golongan II	72
2	Golongan III	174
3	Golongan IV	31
	Jumlah	277

PNS BPPP Bitung berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada Tabel 2. berikut ini :

Tabel 2. PNS BPPP Bitung berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	36
2	D3	63
3	S1	146
4	D4	19
5	S2	13
	Jumlah	277

PNS BPPP Bitung berdasarkan kelompok umur disajikan pada Tabel 3. berikut ini :

Tabel 3. PNS BPPP Bitung berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur PNS						Jumlah
≤25	25-35	36-45	46-55	≥56	≥58	
16	44	121	78	17	1	277

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj BPPP Bitung Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Kata Pengantar, pada bagian ini menyajikan pengesahan dari Kepala Balai;
- b. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menyajikan ringkasan isi dari laporan kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 yang berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala yang dihadapi;
- c. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPP Bitung;
- d. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi perencanaan strategis BPPP Bitung Tahun 2020 – 2024, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja tahun 2023 serta Pengukuran Kinerja;
- e. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;
- f. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya.;
- g. Lampiran, disajikan perjanjian kinerja dan lampiran yang dianggap perlu.

1.6. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BPPP Bitung memiliki 2 (dua) kategori wilayah kerja/pengembangan yang sangat luas yaitu :

- Wilayah pengembangan/kerja dalam pelaksanaan tugas pada kegiatan pelatihan yang meliputi 7 Provinsi dengan 79 Kabupaten/Kota, yaitu : Provinsi Sulawesi Utara (15 Kab/Kota), Gorontalo (6 Kab/Kota), Sulawesi Tengah (13 Kab/Kota), Sulawesi Barat (6 Kab), Sulawesi Selatan (24 Kab/Kota), Kalimantan Timur (10 Kab/Kota) dan Kalimantan Utara (5 Kab/Kota) dengan potensi dan peluang yang harus dikelola oleh BPPP Bitung;
- Wilayah pengembangan/kerja dalam pelaksanaan tugas pada kegiatan Penyuluhan atau sebagai Satminkal Penyuluh Perikanan yang meliputi 4 Provinsi dengan 39 Kabupaten/Kota, yaitu : Provinsi Sulawesi Utara (15 Kab/Kota), Gorontalo (6 Kab/Kota), Sulawesi Tengah (13 Kab/Kota), dan Kalimantan Utara (5 Kab/Kota).

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Bitung dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) Tersedianya SDM yang berlatar pendidikan formal yang memadai dan bersertifikat kompetensi dan keahlian serta berdedikasi;
- 2) Memiliki prasarana dan sarana yang dapat menunjang penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan;
- 3) Sebagian besar SDM BPPP Bitung memiliki usia muda yang produktif;
- 4) BPPP Bitung tersertifikasi SNI ISO 9001:2015;
- 5) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu;
- 6) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Bitung sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 7) Tersedianya akses internet di lingkungan Balai.

Disamping potensi tersebut di atas terdapat peluang, sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam KP dengan meningkatkan kompetensi pelaku utama/usaha KP;
- 2) Adanya jejung kerjasama pelatihan dengan lembaga lain;
- 3) Adanya tuntutan dunia kerja yang mempersyaratkan sertifikasi kompetensi kerja;
- 4) Adanya peluang peningkatan profesionalisme bagi tenaga pelatihan.

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadipilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Bitung memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

- Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :
 - Ketersediaan tenaga pelatih (Instruktur dan Widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa orang sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;
 - Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
- Aspek penyelenggaraan penyuluhan KP :
 - Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
 - Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam pengelolaan kinerja organisasi, BPPP Bitung melaksanakan secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada empat perspektif yang saling berimbang, yaitu *stakeholder perspective*, *Customer perspective*, *Internal Process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, BPPP Bitung telah melakukan penerapan pengelolaan kinerja secara penuh termasuk melakukan penyempurnaan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPP Bitung dan pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

2.1. Rencana Strategis

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, menetapkan visi, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mendukung visi KKP tersebut, BPSDMKP mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”, Puslatluh KP mempunyai visi adalah mendukung visi KKP dan visi BPSDM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong maka BPPP Bitung sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis berada dibawah BPSDM-KP dan Puslatluh KP menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

2.1.1. Visi

Rumusan rencana strategi diawali dengan penetapan visi yang merupakan langkah penting dalam perjalanan organisasi. Visi merupakan gambaran mengenai kondisi yang diinginkan dan hendak dicapai pada masa yang akan datang. Melalui visi, masyarakat bersama stakeholder dan BPPP Bitung bertekad untuk menata dan mengembangkan SDM kelautan dan perikanan kearah yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Rumusan visi BPPP Bitung adalah : mendukung visi KKP, visi BPSDM dan visi Puslatluh KP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2.1.2 Misi

Misi BPPP Bitung adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BPSDM dan Puslatluh KP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;

2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP;

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggung- jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

2.1.3. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan BPPP Bitung merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BPSDMKP dan Puslatluh KP. Untuk itu tujuan pelatihan dan penyuluhan KP adalah:

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing, dan;
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4. Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan BPPP Bitung dalam jangka menengah, sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan BPPP Bitung untuk kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020-2024. Sasaran menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 periode 5 tahun dan secara tahunan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam operasional kegiatan organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun, mulai tahun 2020 hingga 2024. Selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran strategis BPPP Bitung yang ingin dicapai sebagai berikut :

Stakeholders Perspective

- Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung (kelompok), setiap tahun sebanyak 1.500 kelompok selama tahun 2020-2024;
- Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung (kelompok) dengan target 2.000 setiap tahun selama 2020-2024.

Internal Process Perspective

- Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BPPP Bitung (Desa Perikanan Cerdas) sebanyak 1 desa setiap tahunnya dari tahun 2020 s.d. 2024;
- Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung (%) yaitu 65% dari jumlah yang dilatih pada tahun 2022, 70% dari jumlah yang dilatih pada tahun 2023, dan 75% dari jumlah yang dilatih pada tahun 2024;
- Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Bitung (orang) pada tahun 2022 sebanyak 12 orang, tahun 2023 sebanyak 16 orang dan tahun 2024 sebanyak 20 orang.;
- Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Bitung (kelompok) dengan target 3.662 kelompok pada tahun 2022, 3.450 kelompok pada tahun 2023 dan 4.474 kelompok pada tahun 2024;
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang) pada tahun 2022 sebanyak 2.120 orang, pada tahun 2023 sebanyak 2.980 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 5.900 orang;
- Tersedianya Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya (Kaji Terap) di BPPP Bitung pada tahun 2022 dan 2023 ditargetkan 2 paket.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome melalui Sasaran strategis ke empat (SS-4) "Tatakelola pemerintahan yang baik" dengan indikator kinerja :

- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan target 100% dari tahun 2022 sampai dengan 2024;
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai) dari tahun 2022 sampai dengan 2024;
- Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%) dengan target 86% pada tahun 2022 dan 92% pada tahun 2023 sampai dengan 2024;
- Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) dengan target 76 tahun 2022, 76 tahun 2023 dan 76 tahun 2024. Sesuai PK tahun 2023 target indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung 77;
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2022 (%) dari tahun 2022 sampai dengan 2024;

- Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) untuk tahun 2022 70%;
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) target 89 untuk tahun 2022 dan 2022 dan nilai 90 untuk tahun 2023 dan 2024;
- Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai) target nilai 86 untuk tahun 2022, nilai 88 untuk tahun 2023 dan nilai 89 tahun 2024. Pada PK target tahun 2022 dengan nilai 86;
- Nilai PNBPN Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar) untuk tahun 2022 sebesar 0,163 dan untuk tahun 2023 sebesar 0,188 miliar rupiah;
- Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung (orang) untuk tahun 2022 sebanyak 1.201 orang dan untuk tahun 2023 sebanyak 1.061 orang.

2.2. Rencana Kegiatan Tahun 2023

Rencana dan target kegiatan yang akan dilaksanakan tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (performance plan) Tahunan (RKT). RKT tahun 2023 BPPP Bitung memuat rincian kegiatan yang dilakukan indikator kinerja kegiatan dengan pagu Rp. 56.607.073.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4. Rencana Kegiatan Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautandan Perikanan	1.	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung (%)	70
		2.	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	2.980
		3.	Nilai PNBPN Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	0,188
2.	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautandan Perikanan	4.	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)	90
3.	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5.	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Bitung (orang)	16
		6.	Materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Bitung (paket)	2
4.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautandan Perikanan	7.	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Bitung (kelompok)	3.450
		8.	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung (kelompok)	95
		9.	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung (kelompok)	301
		10.	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung (orang)	1.061

5.	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11.	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BPPP Bitung (Desa Perikanan Cerdas)	1
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12.	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Bitung (unit)	2
7.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen	13.	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100
		14.	Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		15.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung	93
		16.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)	92
		17.	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	77
		18.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		19.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	80
		20.	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	77
		21.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	93,75
		22.	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)	82

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja BPPP Bitung merupakan target kerja yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Penetapan kinerja dimaksud merupakan ukuran pelaksanaan keberhasilan dari pelaksanaan tugas yang diembannya, karena penetapan kinerja adalah hasil kesepakatan kerja yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran antara pimpinan instansi dengan pimpinan di atasnya.

Rencana dan target kegiatan yang akan dikerjakan tertuang dalam dokumen rencana kerja (performance plan) RKT tahun 2023. RKT BPPP Bitung memuat rincian kegiatan yang dilakukan indikator kinerja kegiatan. Selanjutnya indikator tersebut akan dinilai untuk mengukur indikator sasaran kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada analisis logical framework. Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung tahun 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada Januari 2023. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Sampai pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung telah mengalami perubahan Perjanjian Kinerja sebanyak 3 kali, yaitu :

1. Pada tanggal 21 Juni 2023, dikarenakan terjadinya penambahan pagu anggaran yang berasal dari pemanfaatan dana PNBK kegiatan pelatihan dan penyuluhan sehingga menyebabkan penambahan pagu anggaran dari pagu awal sebesar Rp. 56.947.073.000 menjadi Rp. 56.972.073.000.
2. Pada tanggal 04 Desember 2023, dikarenakan terjadinya pengurangan pagu anggaran pada pelatihan dan penyuluhan KP, sehingga menyebabkan penurunan pagu anggaran dari pagu awal sebesar Rp. 56.972.073.000 menjadi Rp. Rp 56.607.073.000. Terjadi perubahan target pada kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya dari target awal sebanyak 90 kelompok menjadi 95 kelompok. Terjadi perubahan target Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung dari target awal 92 menjadi 93. Terjadi perubahan target pada rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dari target awal 75% menjadi 80%. Terjadi perubahan target pada Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung dari target awal 89 menjadi 93,75.

Adapun Perjanjian Kinerja awal dan Perjanjian Kinerja revisi BPPP Bitung pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK AWAL	TARGET PK REVISI I	TARGET PK REVISI II
1.	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung (%)	70	70	70
		2.	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	2.980	2.980	2.980
		3.	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	0,188	0,188	0,188
2.	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4.	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)	90	90	90
3.	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5.	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Bitung (orang)	16	16	16
		6.	Materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Bitung (paket)	2	2	2
4.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7.	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Bitung (kelompok)	3.450	3.450	3.450
		8.	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung (kelompok)	90	90	95
		9.	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung (kelompok)	301	301	301
		10.	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung (orang)	1.061	1.061	1.061
5.	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11.	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BPPP Bitung (Desa Perikanan Cerdas)	1	1	1
6.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12.	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Bitung (unit)	2	2	2
7.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen	13.	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100	100	100
		14.	Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	1	1
		15.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP	92	92	93

	Bitung			
16.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)	92	92	92
17.	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	77	77	77
18.	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung (%)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
19.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	75	75	80
20.	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	77	77	77
21.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	89	89	93,75
22.	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)	82	82	82

2.4. Pengukuran Kinerja

2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual IKU pada masing-masing indikator. Perhitungan Indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Nilai 100 – 120 adalah kategori istimewa dengan kode warna biru;
2. Nilai 90 - < 110 adalah kategori baik dengan kode warna hijau;
3. Nilai 70 - < 90 adalah kategori cukup dengan kode warna kuning;
4. Nilai 50 - < 70 adalah kategori kurang dengan kode warna merah;
5. Untuk nilai < 50 adalah kategori sangat kurang dengan kode warna hitam; Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 100 – 120
Baik	Nilai 90 - < 110
Cukup	Nilai 70 - < 90
Kurang	Nilai 50 - < 70
Sangat kurang	Untuk nilai < 50

Gambar 2. Indeks Capaian IKU

Sumber : *kinerjaku.kkp.go.id*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing Indikator.

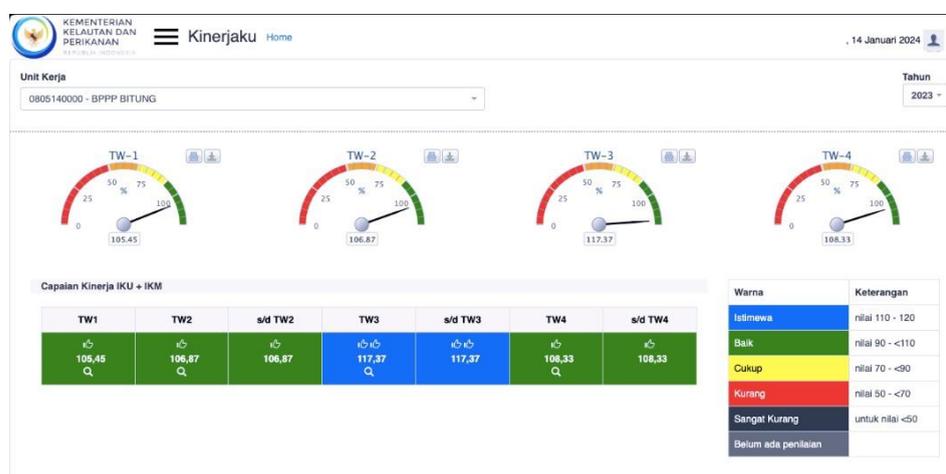
2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BPPP Bitung dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran dan pelaporan kinerja telah ditugaskan dan ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPPP Bitung Nomor : B.94a/BPPP.BTG/TU.140/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yaitu Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2023. Keanggotaan tim terdiri dari pegawai yang memiliki kualifikasi terkait pengukuran dan pelaporan kinerja dibuktikan dengan sertifikat.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 sebesar 108.33% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif seperti gambar berikut :



Gambar 3. Skor Kinerja BPPP Bitung Tahun 2023

Sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Tahun 2023 dari 22 (dua puluh dua) IKU BPPP Bitung, Capaian sasaran tahun 2023 ini merupakan kontribusi capaian atas 3 sasaran kegiatan dan 10 Indikator Kinerja Utama. Seluruh target IKU di yang telah direncanakan telah berwarna hijau dan biru, itu artinya target yang telah ditetapkan telah tercapai seluruhnya dengan kriteria baik dan istimewa.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPP Bitung. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis BPPP Bitung yang menjadi kontrak kerja pada tahun 2023 dapat dicapai.

Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPPP Bitung s.d Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	No.	Indikator	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Persentase Realisasi
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung (%)	70	70,28	100,40%
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	2.980	3.130	105,03%
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	0,188	0,42	120%
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)	90	108	120%
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Bitung (orang)	16	20	120%
		6	Materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Bitung (paket)	2	2	100%
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Bitung (kelompok)	3.450	3.450	100%
		8	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung (kelompok)	95	102	107,37%
		9	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung (kelompok)	301	361	119,93%
		10	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung (orang)	1.061	1.070	100,85%
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BPPP Bitung (Desa Perikanan Cerdas)	1	1	100%
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Bitung (unit)	2	2	100%
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen	13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100	100	100%

	14	Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1	1	100%
	15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai)	93	93,98	101,05%
	16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)	92	116,58	120%
	17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	77	83,14	107,97%
	18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2022 (%)	≤ 0,5	0	120%
	19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	80	100	120%
	20	Nilai PM SAKIP BPPP Bitung (nilai)	77	82,25	106,82%
	21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	93,75	95,96	102,36
	22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)	82	86,09	104,99

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.01.01 Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)**

Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan (meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau wirausaha KP yang dihitung melalui evaluasi pelatihan.

Tabel 7. Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan								
IK 1. Persentase Lulusan Pelatihan yang Terserap di Dunia Usaha dan Industri (%)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
39,16	62,58	65,28	70,00	70,28	100,40	7,66	65,00	108,12

Berdasarkan data pada tabel diatas persentase realisasi lulusan pelatihan yang terserap di dunia industri di BPPP Bitung pada terus mengalami kenaikan dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2020 persentase realisasi lulusan pelatihan yang terserap di dunia industri sebanyak 39,16%, pada tahun 2021 sebanyak 62,58%, tahun 2022 sebanyak 65,28%, dan tahun 2023 sebanyak 70,28%. Berdasarkan capaian dan realisasi pada tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel diatas, maka pada indikator kinerja **IKSK.01.01** telah tercapai 100,40%. Peningkatan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023 yaitu sebesar 7,66%. Selanjutnya berdasarkan Renstra BPPP Bitung tahun 2020-2024, target persentase realisasi lulusan pelatihan yang terserap di dunia industri di BPPP Bitung pada tahun 2024 yaitu sebesar 65%, maka jika dibandingkan dengan target tersebut, berarti capaian pada ini adalah 108,12%. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Perbandingan realisasi persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No	Nama Satker	% Target Capaian Satker	% Realisasi Capaian Satker	Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	70,00	70,00	100,00
2	BPPP Tegal	70,00	77,83	111,18
3	BPPP Banyuwangi	70,00	70,00	100,00
4	BPPP Ambon	70,00	72,30	103,28
5	BPPP Bitung	70,00	70,28	100,40

Faktor penunjang keberhasilan dari capaian indikator ini adalah tersedianya pedoman penyelenggaraan pelatihan, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta *database* penyelenggaraan pelatihan melalui SIMLAT KP sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pelatihan di BPPP Bitung. Selanjutnya adanya pendampingan dari penyuluh perikanan pasca pelaksanaan pelatihan. Kegiatan positif yang dilakukan dalam menunjang pencapaian target IKU ini adalah adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka mengawal tercapainya tujuan.





Gambar 4. Pendampingan dalam upaya menunjang keberhasilan kelompok

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Dilaksanakan kegiatan evaluasi pasca pelatihan untuk mengidentifikasi purnawidya yang telah terserap di dunia usaha/industri yang mudah dipahami oleh purnawidya.
2. Melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan instrumen evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.
3. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh perikanan dalam mengidentifikasi dan melakukan pengisian instrumen evaluasi pasca pelatihan dan pendampingan penerapan hasil pelatihan.

● **IKSK.01.02 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)**

Pada tahun 2023 pelatihan bagi masyarakat kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan tiga metode pelatihan yaitu pelatihan reguler (klasikal), *full online training* dan *blended learning* (kombinasi online dan klasikal). Pelatihan tersebut menggunakan anggaran APBN dalam DIPA BPPP Bitung TA 2023. Pelatihan yang diselenggarakan BPPP Bitung terdiri dari beberapa bidang pelatihan. Bidang Budidaya melatih sebanyak 1.020 orang, Bidang Penangkapan melatih sebanyak 1.210 orang, Bidang Permesinan melatih sebanyak 260 orang, Bidang Pengolahan dan Pemasaran melatih sebanyak 561 orang dan Bidang Fiber Glass melatih sebanyak 79 orang.

Selain pelatihan tersebut BPPP Bitung juga melaksanakan pelatihan kecakapan nelayan (SKN) yang dibiayai melalui APBN Eselon I lainnya, serta pelatihan teknis lainnya yang bekerja sama dengan instansi lain seperti Balai Pelatihan Kerja (BLK) Bitung dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan								
IK 2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang)								
Realisasi TW IV			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020 - 2022			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
2020	2021	2022						
2.357	1.550	2.120	2.980	3.130	105,03	47,64	5.900	53,05

Berdasarkan data pada tabel diatas realisasi pelatihan pada berfluktuasidalam 4 tahun terakhir. Terjadi penurunan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023. Pada tahun 2020 masyarakat KP yang dilatih sebanyak 2.357 orang sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.550 orang. Selanjutnya pada tahun 2022 masyarakat KP yang dilatih sebanyak 2.120 orang dan pada 2023 sebanyak 3.130 orang. Penurunan capaian dan target pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi target masyarakat yang dilatih.

Berdasarkan capaian dan realisasi pada tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel diatas, maka pada indikator kinerja **IKSK.01.02** telah tercapai 105,03%. Peningkatan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023 yaitu sebesar 47,64%. Selanjutnya berdasarkan Renstra BPPP Bitung tahun 2020-2024, target masyarakat KP yang dilatih pada tahun 2024 yaitu 5.900 orang, maka jika dibandingkan dengan target tersebut, berarti capaian pada ini adalah 53,05%. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan realisasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (orang)	Realisasi Capain Satker (orang)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	3.200	3.200	100
2	BPPP Tegal	16.710	17.759	106,28
3	BPPP Banyuwangi	6.809	6.869	100,88
4	BPPP Ambon	3.414	3.560	104,28
5	BPPP Bitung	2.980	3.130	105,03

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini adalah tersedianya pedoman penyelenggaraan pelatihan, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta *database* penyelenggaraan pelatihan melalui SIMLAT KP sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pelatihan di BPPP Bitung. Kegiatan positif yang dilakukan dalam menunjang pencapaian target IKU ini adalah koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* terkait seperti Dinas KP baik secara langsung maupun melalui penyuluh perikanan. Registrasi peserta kegiatan pelatihan telah mulai dilakukan dengan form online, dalam rangka efisiensi sumberdaya.

● **IKSK.01.03 Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)**

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Berikut rincian target PNBP tahun 2023.

Tabel 11. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan								
IK 3. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)								
Realisasi TW IV			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020 - 2022			Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	0,28	0,188	0,42	120,00	50,00	0,188	120,00

Berdasarkan data pada tabel diatas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun 2023 yaitu 0,188 Miliar Rupiah. Realisasi pada yaitu 0,42 Miliar Rupiah dari target 0,188 Miliar Rupiah atau dengan persentase capaian 120%. Persentase capaian terhadap target Renstra adalah 120%. Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) salah satunya berasal dari layanan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya dan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (Rupiah Miliar)	Realisasi Capain Satker (Rupiah Miliar)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	0,375	0,431	116,22
2	BPPP Tegal	7,19	9,17	120,00
3	BPPP Banyuwangi	0,57	1,42	120,00
4	BPPP Ambon	0,57	0,703	120,00
5	BPPP Bitung	0,188	0,418	120,00

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini adalah tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai sehingga menarik minat pengguna jasa untuk menggunakan layanan. Kegiatan positif yang dilakukan dalam menunjang pencapaian target IKU ini adalah terus-menerus dilakukan upaya dalam meningkatkan kualitas layanan dan melakukan promosi melalui media sosial.

Perolehan PNBP tergantung dari stakeholder yang memanfaatkan layanan dan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sehingga tidak dapat dikendalikan atau diperkirakan pendapatannya secara pasti pada setiap periode selain hal tersebut penerimaan PNBP masih secara manual. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya :

1. Kegiatan pelatihan Basic Safety Training (BST) yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama pelatihan yang menggunakan sarana dan prasarana BPPP Bitung yang sangat memadai.

Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.02.01 SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)**

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikasi kompetensi yang dilakukan terdiri dari beberapa bidang. Bidang Budidaya melakukan sertifikasi sebanyak 24 orang, Bidang Penangkapan melakukan sertifikasi sebanyak 28 orang, Bidang Pengolahan dan Pemasaran melakukan sertifikasi sebanyak 38 orang dan Penyuluh Perikanan 18 orang. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)

Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan								
IK 4. SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	90,00	108,00	120,00	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas realisasi SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung tahun 2023 adalah 108 orang dari target 90 orang sehingga persentasenya adalah 120%. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel Dibawah ini.

Tabel 14. Perbandingan realisasi SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (orang)	Realisasi Capaian Satker (orang)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	90	108	120,00
2	BPPP Tegal	1.440	1.468	101,94
3	BPPP Banyuwangi	180	184	102,22
4	BPPP Ambon	90	90	100,00
5	BPPP Bitung	90	108	120,00

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini adalah SDM asesor yang kompeten dibidangnya, Lembaga Sertifikasi Profesi yang aktif relisensinya serta sumberdaya yang memadai. Faktor lain dalam hal tercapainya IKU ini adalah peserta uji kompetensi yang terlebih dahulu dilakukan pelatihan sehingga peserta pelatihan telah dibekali sesuai dengan materi yang akan diujikan oleh asesor. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. kegiatan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama sertifikasi kompetensi dengan penyuluh perikanan bantu untuk meningkatkan kompetensi teknsi sebagai penyuluh perikanan

Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP

- **IKSK.03.01 Lulusan Pelatihan yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) di BPPP Bitung (orang)**

Meningkatkan kompetensi SDM KP adalah tujuan utama pelatihan dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh BPPP Bitung. IKS.03.01 Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Bitung merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital). IKU Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Bitung diukur dengan menghitung Jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital (media sosial dan lain sebagainya) dalam pengembangan usahanya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan/evaluasi dampak pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Bitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Lulusan Pelatihan yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) (orang)

Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP								
IK 5. Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) (Orang)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
6,00	5,00	12,00	16,00	20,00	120,00	66,67	12,00	120,00

Berdasarkan data pada tabel diatas realisasi lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) pada berfluktuasi dalam 4 tahun terakhir. Terjadi penurunan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020,selanjutnya terjadi kenaikan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2021 lulusanyang membentuk usaha rintisan sejumlah 5 orang sedangkan pada tahun 2020 tercapai sejumlah 6 orang, selanjutnya pada tahun 2022 tercapai 12 orang dan pada 2023 tercapai 20 orang. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian persyaratan data dukung dalam Manual IKU.

Berdasarkan capaian dan realisasi pada tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel diatas, maka pada indikator kinerja **IKSK.03.01** telah tercapai 120%, dan berdasarkan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023, **IKSK.04.01** ini mengalami kenaikan capaian yaitu sebesar 66,67%. Selanjutnya berdasarkan Renstra BPPP Bitung tahun 2020-2024, target **IKSK.03.01** pada tahun 2024 yaitu 12 orang, maka jika dibandingkan dengan target tersebut, berarti persentase capaian Renstra pada iniadalah 120%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Perbandingan realisasi Lulusan Pelatihan yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (orang)	Realisasi Capain Satker (orang)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	22	22	100,00
2	BPPP Tegal	47	50	106,38
3	BPPP Banyuwangi	36	36	100,00
4	BPPP Ambon	16	16	100,00
5	BPPP Bitung	16	20	120,00

Faktor keberhasilan indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh BPPP Bitung selama tahun 2023. Kegiatan tersebut menghasilkan lulusan pelaku utama/usaha untuk melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital. Efisiensi sumberdaya manusia bahwa pelaksanaan kegiatan ini melibatkan widyaiswara/instruktur dan penyuluh perikanan di wilayah satminkal BPPP Bitung sesuai ketersediaan anggaran dalam menjaring start up. Selain itu, yang juga menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain telah banyak kelompok yang memanfaatkan teknologi media sosial seperti facebook, instagram maupun whatsapp. Media sosial ini sangat efektif dimana produk tersebut dapat dijual ke seluruh pelosok negeri terutama terjual di pasar lokal. Teknologi media sosial juga dapat mengurangi biaya promosi sehingga biaya tersebut dapat digunakan kembali untuk biaya operasional.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah menyiapkan instrumen Evaluasi pasca pelatihan untuk identifikasi purnawidya yang membentuk start up (usaha rintisan)
2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan dalam identifikasi dan pengisian instrumen Evaluasi pasca pelatihan.

● **IKSK.03.02 Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya (Paket)**

IKU Tersedianya materi pelatihan berbasis Kaji Widya merupakan indikator yang menunjukkan jumlah paket kaji widya yang dibuat oleh Instruktur/Widyaiswara di BPPP Bitung yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan materi pelatihan kelautan danperikanan. IKU ini diukur dengan akumulasi jumlah paket Kaji Widya yang dihasilkan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Bitung (Paket)

Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP								
IK 6. Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya (Paket)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	5,00	2,00	2,00	2,00	100,00	0,00	4,00	50,00

Berdasarkan data pada tabel diatas realisasi materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Bitung sebanyak 2 paket dengan target 2 paket pada Tahun 2023, sehingga persentase capaian tersedianya materi pelatihan berbasis kaji widya adalah 100%. IKU Tersedianya materi pelatihan berbasis Kaji Widya dapat dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebanyak 5 paket dan 2022 sebanyak 2 paket. Tahun 2020, IKU ini belum tersedia sehingga tidak dapat dibandingkan. Target Renstra BPPP Bitung untuk Tahun 2024, IKU ini ditargetkan sebanyak 4 paket dengan capaian terhadap target 2024 yaitu 50%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Bitung (Paket) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (paket)	Realisasi Capain Satker (paket)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	2	2	100,00
2	BPPP Tegal	2	3	120,00
3	BPPP Banyuwangi	2	2	100,00
4	BPPP Ambon	2	2	100,00
5	BPPP Bitung	2	2	100,00

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pelaksanaan Kaji Widya yaitu dengan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di BPPP Bitung melalui inovasi oleh Widyaiswara dan Instruktur dengan mencoba, mengolah, menganalisis, menyimpulkan dan mengaplikasikan sebagai bahan ajar yang akan dilatihkan sehingga kegiatan ini dapat menimbulkan efisiensi sumber daya manusia. BPPP Bitung mendorong peningkatan kompetensi tenaga kediklatan yang profesional terutama Widyaiswara dan Instruktur.

Keberhasilan dalam menyelesaikan IKU tidak lepas dari peran instruktur bidang penangkapan dan bidang permesinan dalam hal mencari referensi-referensi terkait kajiwidya yang akan dilakukan sehingga hasil yang didapat dibandingkan dengan referensi pada jurnal. Selain itu, hasil kajiwidya yang didapat ditambahkan dengan referensi disandingkan untuk membuat bahan ajar. Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian

kinerja tak lepas dari diseminarkan nya hasil kajiwidya dengan mengundang narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan kajiwidya yang dilakukan. Narasumber tersebut memberikan masukan terhadap hasil kajiwidya yang didapatkan. Tak cukup sampai disitu, seminar kajiwidya juga didukung oleh kehadiran para instruktur/widyaiswara dari BPPP lain melalui zoom meeting dan para peserta lain yang berasal dari umum.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah memiliki juknis pelaksanaan kegiatan kaji widya sehingga memudahkan tenaga fungsional dalam penyusunan laporan kegiatan.
2. Telah dibuat jadwal Pelaksanaan kegiatan kaji widya yang telah disahkan oleh Kepala BPPP Bitung

Sasaran Kegiatan 4 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.04.01 Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh (kelompok)**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kelompok kelautan dan perikanan yang disuluh di Satminkal BPPP Bitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh (kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
IK 7. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh (kelompok)								
Realisasi TW IV			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020 - 2022								
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
3.371,00	3.315,00	3.733,00	3.450,00	3.450,00	100,00	-7,58	4.474,00	77,11

Berdasarkan data pada tabel diatas realisasi kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh pada berfluktuasi dalam 4 tahun terakhir. Terjadi penurunan capaian pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020,selanjutnya terjadi kenaikan pada tahun 2022 dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2023. Pada tahun 2021 kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh tercapai sebanyak 3.315 kelompok sedangkan pada tahun 2020 tercapai 3.371 kelompok, selanjutnya pada tahun 2022 tercapai 3.733 kelompok dan pada2023 tercapai 3.450 kelompok. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian persyaratan data dukung dalam Manual IKU.

Pada tahun 2021 sesuai Manual IKU, data dukung capaian kelompok masyarakat KP yang disuluh disajikan dalam bentuk *excel* dan disahkan oleh Kepala BPPP Bitung; sedangkan pada pertengahan tahun 2022 data capaian kelompok masyarakat KP yang disuluh oleh penyuluh perikanan yang disahkan oleh Kepala Satminkal,

dilengkapi dengan link data dukung profil. Selanjutnya pada tahun 2023 data kelompok masyarakat KP yang telah disuluh oleh penyuluh perikanan yang disahkan oleh Kepala Satminkal, dilengkapi dengan link data dukung profil kelompok yang dilengkapi lampiran SK penumbuhan atau piagam peningkatan kelas kelompok. Selain itu pencantuman nomor sertifikat/piagam pengukuhan harus sesuai dengan Perka BRSDM nomor 4 tahun 2019, sehingga membutuhkan waktu tambahan bagi penyuluh perikanan dalam menyiapkan data dukung sesuai yang dipersyaratkan.

Berdasarkan capaian dan realisasi pada tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel diatas, maka pada indikator kinerja **IKSK.04.01** telah tercapai 100%, Namun berdasarkan capaian tahun 2022 dengan tahun 2023, **IKSK.04.01** ini mengalami penurunan capaian yaitu sebesar 7,58%. Menurunnya IKU tersebut disebabkan masih banyaknya penyuluh yang belum sepenuhnya mengerti tentang petunjuk teknis dan data dukung capaian apa saja yang harus dipenuhi pada IKU tersebut. Data dukung yang banyak mengalami permasalahan ada pada profil kelompok dan sertifikat pengukuhan serta terdapatnya NIK ketua kelompok yang sama sehingga mengurangi jumlah capaian IKU. Selanjutnya berdasarkan Renstra BPPP Bitung tahun 2020-2024, target **IKSK.04.01** pada tahun 2024 yaitu 4.474 kelompok, maka jika dibandingkan dengan target tersebut, berarti persentase capaian Renstra pada ini adalah 77,11%.

Kelompok yang disuluh terdiri dari beberapa bidang. Bidang Budidaya terdapat 1.360 kelompok yang disuluh, Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdapat 307 kelompok yang disuluh, Bidang Garam terdapat 11 kelompok yang disuluh, Bidang Penangkapan terdapat 1.764 kelompok yang disuluh dan Bidang Pomaswas/Konservasi sebanyak 8 kelompok yang disuluh. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	6.200	6208	100,13
2	BPPP Tegal	6.400	6.400	100,00
3	BPPP Banyuwangi	6.100	6.100	100,00
4	BPPP Ambon	2.750	3.015	109,64
5	BPPP Bitung	3.450	3.450	100,00

Keberhasilan kegiatan penyuluhan terus dilakukan oleh Penyuluh perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu Satminkal BPPP Bitung kepada pelaku utama/usaha perikanan, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor KP. Kegagalan kegiatan ini dapat disebabkan oleh pola pikir pelaku utama/usaha perikanan yang masih mengharapkan bantuan dari pemerintah dan permasalahan internal yang dapat menyebabkan perpecahan dalam kelompok. Keragaman penyuluh perikanan dari tingkat pendidikan dan status

kepegawaian (PNS, PPPK dan Kontrak) serta kurangnya pengalaman bekerja sebagai penyuluh perikanan sehingga terdapat perbedaan kemampuan penyuluh perikanan dalam melakukan fasilitas pendampingan dan akses bagi kelompok. Selain itu tidak meratanya lokasi penempatan penyuluh perikanan, sehingga pendampingan tidak efektif.

Solusi yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu melakukan pertemuan rutin terhadap penyuluh perikanan di masing-masing lokasi menggunakan zoom meeting untuk membahas sejauh mana realisasi IKU yang telah dilakukan. Pertemuan rutin tersebut dapat dilakukan satu minggu atau dua minggu sekali. Pertemuan rutin tersebut juga diharapkan dapat menjalin komunikasi terlebih jika mendapati adanya perubahan terhadap data dukung capaian IKU yang harus ditambahkan. Meningkatkan kapasitas penyuluh perikanan baik secara teknis maupun manajerial dan pemerataan jumlah penyuluh perikanan sesuai dengan lokasi potensi perikanan yang ada di satminkal BPPP Bitung juga dapat menjadi solusi selanjutnya. Selain itu merubah mindset pelaku utama/usaha perikanan untuk dapat meningkatkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan di sektor KP. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia bahwa kegiatan ini dilakukan oleh penyuluh perikanan dan penyuluh perikanan bantu yang ditempatkan pada lokasi masing-masing, sehingga kegiatan penyuluhan lebih efektif dan efisien.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki kegiatan strategis, yaitu masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.

- **IKSK.04.02 Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)**

Tabel 21. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
IK 8. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (kelompok)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
253,00	55,00	94,00	95,00	102,00	107,37	8,51	40,00	120,00

Berdasarkan data pada tabel diatas realisasi kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang ditingkatkan kelasnya pada berfluktuasi dalam 4 tahun terakhir. Namun jika dibandingkan target dan realisasi secara tahunan, IKU ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan realisasi pada tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja **IKSK.04.02** telah tercapai 107,37%. Selanjutnya berdasarkan Renstra tahun 2020-2024, target **IKSK.04.02** pada tahun 2024 yaitu 40 kelompok,

maka jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 tersebut, berarti capaian terhadap target 2024 adalah 120%. Kelompok yang ditingkatkan kelasnya terdiri dari beberapa bidang. Kelompok Bidang Budidaya yang ditingkatkan kelasnya sebanyak 40 kelompok, Kelompok Bidang Penangkapan yang ditingkatkan kelasnya sebanyak 41 kelompok dan Kelompok Bidang Pengolahan dan Pemasaran yang ditingkatkan kelasnya sebanyak 21 kelompok.

Kegiatan positif yang dilakukan dalam upaya menunjang pencapaian target IKU ini adalah melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara intensif baik secara langsung maupun melalui rapat online kepada penyuluh perikanan di Wilayah Satminkal BPPP Bitung. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	245	250	102,04
2	BPPP Tegal	265	265	100,00
3	BPPP Banyuwangi	312	312	100,00
4	BPPP Ambon	83	88	106,02
5	BPPP Bitung	95	102	107,37

Analisis keberhasilan Pelaku utama/usaha sebagai subyek dengan menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga diharapkan pelaku utama/usaha dapat menjadi tonggak terbentuknya kelembagaan/ organisasi yang kuat dan mandiri dalam mencapai tujuan bersama dari anggotanya. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini karena pelaksanaan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu dimasing-masing wilayah kerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dilakukan dengan terus memberikan informasi kepada penyuluh melalui rapat rutin per minggu tentang update data IKU, seperti perubahan data dukung yang harus dipenuhi dan tanda tangan dalam sertifikat kenaikan kelas harus pejabat minimal Camat. Jumlah nomor urut juga harus selalui diperiksa karena sering terdapat kesalahan dalam penjumlahan sehingga diharapkan telah menggunakan rumus. Melakukan verifikasi secara ganda juga harus dilakukan agar dapat meminimalisir kekurangan dan kesalahan data dukung.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Penyuluh melakukan pendampingan kelompok dan telah mengidentifikasi dan melakukan peningkatan kelas

kelompok terhadap calon kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui pendampingan yang dilakukan.

3. Surat Keputusan dan verifikasi oleh Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang telah ditetapkan.

● **IKSK.04.03 Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk (kelompok)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan yang dibentuk oleh Penyuluh Perikanan SATMINKAL BPPP Bitung dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Keputusan Menteri KP Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan KelembagaanPelaku utama Perikanan. Dalam proses penumbuhannya Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala Dinas Perikanan setempat. Capaian IKU kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Bitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk (kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
IK 9. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk (kelompok)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
271,00	354,00	439,00	301,00	361,00	119,93	-17,77	100,00	120,00

Berdasarkan data pada tabel diatas realisasi kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang dibentuk pada terus meningkat dari tahun 2020 hinggatahun 2022 lalu menurun di tahun 2023. Berdasarkan realisasi pada tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada indikator kinerja **IKSK.04.03** telah tercapai 120% dari target 301 kelompok. Dikarenakan adanya penyesuaian target kelompok yang dibentuk dengan jumlah penyuluh di lapangan menyebabkan terjadi penurunan target ditahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga persentase capaian padatahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,77% dibandingkan dengan tahun 2022.

Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang dibentuk terdiri dari beberapa bidang. Kelompok Bidang Budidaya yang dibentuk sebanyak 141 kelompok, Kelompok Bidang Penangkapan yang dibentuk sebanyak 171 kelompok, Kelompok Bidang Pengolahan dan Pemasaran yang dibentuk sebanyak 47 kelompok dan Kelompok Bidang Pomaswas/Konservasi yang dibentuk sebanyak 2 kelompok. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	490	499	101,84
2	BPPP Tegal	413	450	108,96
3	BPPP Banyuwangi	605	617	101,98
4	BPPP Ambon	190	210	110,53
5	BPPP Bitung	301	361	119,93

Analisis keberhasilan pada IKU ini yaitu pelaku utama/usaha mendapatkan pembinaan oleh penyuluh perikanan dan penyuluh perikanan bantu yang memiliki usaha dibidang perikanan, terorganisasi dan mempunyai tujuan yang sama untuk kemandirian. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia bahwa kegiatan ini melibatkan aparat desa, pelaku utama/usaha perikanan, masyarakat dan penyuluh. Selain itu, aktifnya penyuluh turun ke lapangan menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam membentuk kelompok. Sosialisasi yang tepat dapat membuat wawasan pelaku usaha sehingga mereka menemukan manfaat dari pembentukan kelompok. Pertemuan rutin setiap minggu juga membantu dalam memenuhi data dukung capaian kinerja IKU tersebut dimana dapat saling bertukar informasi dan mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi pada IKU juga dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2023.

● **IKSK.04.04 Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPP Bitung (orang)**

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik disektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan.

Tabel 25. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPP Bitung (orang)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
IK 10. Tenaga Kerja Yang Terlibat Lingkup BPPP Bitung (orang)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	1.455,00	1.061,00	1.070,00	100,85	-26,46	-	-

IKU tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 karena IKU masih baru. Berdasarkan data pada tabel di atas realisasi tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung pada tahun 2023 sebanyak 1070 orang. Capaian IKU ini sebesar 100,85% dari target 1061 orang di tahun 2023. Terjadi penurunan realisasi tenaga kerja yang terlibat di tahun 2023 sebesar 26,46% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya IKU tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung termasuk didalamnya Penyuluh Perikanan Bantu, Penyuluh Swadaya, UMKM yang disuluh dan P2MKP.

Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung (orang) terdiri dari beberapa tenaga kerja. Tenaga kerja penyuluh perikanan bantu sebanyak 101 orang, tenaga kerja UMKM sebanyak 961 orang dan tenaga kerja P2MKP sebanyak 8 orang. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Tenaga Kerja yang Terlibat Lingkup BPPP Bitung (orang) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capaian Satker (kelompok)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	1.744	1.744	100,00
2	BPPP Tegal	2.064	2.064	100,00
3	BPPP Banyuwangi	1.930	1.936	100,00
4	BPPP Ambon	348	394	113,22
5	BPPP Bitung	1.061	1.070	100,85

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah kemudahan pengisian instrumen tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Bitung baik yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan maupun pengelola Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Sosialisasi peranan penyuluh perikanan baik PNS, PPB dan Swadaya dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Bitung
2. Sosialisasi peranan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Bitung

Sasaran Kegiatan 5 Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

• **IKSK.05.01 Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)**

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal percontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan percontohan dan Pedoman SFV.IKU ini sudah ada pada tahun 2020 dengan pencapaian sebanyak 1 kelompok, tahun 2021 sebanyak 1 kelompok dan pada tahun 2022 sebanyak 1 kelompok. Sampai akhir Tahun 2023, BPPP Bitung sudah melakukan kegiatan percontohan penyuluhan KP sebanyak 1 kelompok di Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 27. Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP								
IK 11. Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	100,00

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok) lingkup BPPP Bitung cenderung stabil dari tahun ke tahun. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan realisasi yang terjadi di tahun 2022 maupun 2023. Target renstra di tahun 2024 tercapai yaitu 1 desa. Persentase capaian terhadap target renstra 2024 yaitu sebesar 100%. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia bahwa kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan penyuluh. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	1	1	100,00
2	BPPP Tegal	2	2	100,00
3	BPPP Banyuwangi	1	1	100,00
4	BPPP Ambon	1	1	100,00
5	BPPP Bitung	1	1	100,00

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah peningkatan kinerja penyuluhan dilakukan baik secara daring maupun luring oleh Kepala BPPP Bitung dalam rangka merealisasikan indikator kinerja individu yang terascading langsung kepada indikator kinerja BPPP Bitung. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya :

1. Kepala BPPP Bitung memberikan instruksi kepada penyuluh Satminkal terkait pemenuhan kinerja untuk pencapaian IKU tersebut sehingga para penyuluh memiliki kinerja yang lebih baik dengan merealisasikan tunjangan kinerjanya dan PPB untuk mengirimkan bukti pembayaran BOP setiap bulannya dan melakukan pembayaran BOP penyuluh PNS maupun PPB secara tepat waktu sebagai bukti bahwa penyuluh telah melakukan penyuluhan kepada kelompok utama/usaha binaanya dan melakukan kegiatan pembentukan kelompok.
2. Pelaksanaan kegiatan percontohan KP berdasarkan juknis yang telah ditetapkan oleh Puslatluh KP.

Sasaran Kegiatan 6 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.06.01 Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar (unit)**

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh BPPP Bitung. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja BPPP Bitung.

Tabel 29. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar (unit)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
IK 12. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar (unit)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	100,00	100,00	2,00	100,00

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Bitung sebanyak 2 unit dari target 2 unit sehingga persentase capaian sebesar 100%. Terjadi kenaikan 100% dari realisasi di tahun 2022. Pada Renstra BPPP Bitung sudah tersedia IKU ini dengan target sebanyak 2 unit, sehingga IKU ini dapat dibandingkan dengan Renstra BPPP Bitung.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya bahwa dalam mencapai indikator ini diselesaikan oleh SDM BPPP Bitung yang kompeten dibidangnya. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30. Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Terstandar (unit) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (unit)	Realisasi Capaian Satker (unit)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	1	1	100,00
2	BPPP Tegal	2	1	50,00
3	BPPP Banyuwangi	1	1	100,00
4	BPPP Ambon	1	1	100,00
5	BPPP Bitung	2	2	100,00

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Bitung membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sasaran Kegiatan 7 Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen

- **IKSK.07.01 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)**

Layanan Dukungan manajemen internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan movev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal serta layanan perkantoran.

Tabel 31. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 13. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)								
Realisasi TW IV			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020 - 2022			Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan TW	Target	% Capaian Thd
2020	2021	2022	2023	2023		IV 2022 - 2023	2024	Target 2024
-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan layanan dukungan manajemen telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% selesai pada . Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh SDM BPPP Bitung. Analisis keberhasilan dari capaian IKU ini adalah penyajian laporan dan data dukung serta ketetapan waktu dalam melakukan penginputan data capaian. Efisiensi sumberdaya bahwa dalam pencapaian kegiatan ini didukung oleh SDM BPPP Bitung yang telah mengikuti bimtek/diklat/pelatihan sesuai bidang dan didukung dengan sistem pelaporan melalui aplikasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya bahwa dalam mencapai indikator ini diselesaikan oleh SDM BPPP Bitung yang kompeten dibidangnya. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 32. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (unit)	Realisasi Capain Satker (unit)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	100	106,33	106,33
2	BPPP Tegal	100	100	100,00
3	BPPP Banyuwangi	100	100	100,00
4	BPPP Ambon	100	100	100,00
5	BPPP Bitung	100	100	100,00

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh dokumen yang telah ditargetkan dapat terpenuhi dengan baik.

• **IKSK.07.02 Unit Kerja BPPP Bitung yang Dibangun untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)**

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik, pembinaan, identifikasi dan membangun Unit Kerja yang akan diusulkan menjadi Menuju WBK/WBBM minimal 1 (satu) tahun dan/atau pada tahun berjalan sebelum diusulkan. Perhitungan Unit Kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) adalah Tim pembina/pendamping BRSDM yang terdiri dari unsur Sekretariat, dan Pusat terkait, melakukan pembinaan/pendampingan kepada satker yang ditunjuk sebagai calon menuju WBK, untuk penyiapan dokumen dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses.

Tabel 33. Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 14. Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00	-	-

Tahun 2023, target indikator Unit Kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah 1 satker. Capaian IKU ini sebesar 1 unit dengan persentase capaian IKU ini adalah 100%. Efisiensi sumberdaya bahwa dalam pencapaian kegiatan ini didukung oleh SDM BPPP Bitung yang telah mengikuti bimtek/diklat/pelatihan sesuai bidang dan didukung dengan sistem pelaporan melalui aplikasi. Analisis keberhasilan dari capaian IKU ini adalah penyajian laporan dan data dukung serta ketepatan waktu dalam

melakukan pengumpulan data capaian. BPPP Banyuwangi, BPPP Medan dan BPPP Tegal tidak memiliki IKU ini karena sudah memiliki predikat WBK pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, BPPP Ambon berhasil mendapatkan predikat WBK pada tahun 2023 dan BPPP Bitung mendapatkan kesempatan kembali pada Tahun 2024, karena pada tahun 2023 masih diusulkan menuju WBK.

Tabel 34. Unit Kerja BPPP Bitung yang Dibangun untuk Diusulkan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)

No	Nama Satker	Target Capaian Satker	Realisasi Capaian Satker	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	-	-	-
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	-	-	-
4	BPPP Ambon	1	1	100,00
5	BPPP Bitung	1	1	100,00

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya form Time Line terkait pembuatan seluruh dokumen seluruh area perubahan dalam Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK). Atas pencapaian kinerja IKU tersebut pada Tahun 2023, sehingga memudahkan dalam pengumpulan dokumen untuk Tahun 2024. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan.

IKSK.07.03 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai)

IKU rekonsiliasi kinerja BPPP Bitung merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), target kinerja dan cara pencapaian kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 35. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	97,99	97,76	93,00	93,98	101,05	-3,87	80,00	117,48

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwanilai rekonsiliasi kinerja BPPP Bitung sebesar 93,98 dengan target 93, sehingga persentase capaian IKU ini adalah sebesar 101,05%. IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 97,99 dan 2022 sebesar 97,76. Untuk tahun 2020 tidak bisa dibandingkan karena IKU ini tidak ada . Pada Renstra

BPPP Bitung, IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung ditargetkan dengan nilai 80 sehingga KU ini dapat dibandingkan dengan Renstra BPPP Bitung. Analisis keberhasilan pada IKU ini terletak pada Penyajian data yang sesuai atau keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK BPPP Bitung. Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaan melibatkan ASN BPPP Bitung yang sudah mendapatkan pembekalan penilaian rekonsiliasi kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya bahwa dalam mencapai indikator ini diselesaikan oleh SDM BPPP Bitung yang kompeten dibidangnya. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 36. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (nilai)	Realisasi Capain Satker (nilai)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	93	98,36	105,76
2	BPPP Tegal	93	94,00	101,08
3	BPPP Banyuwangi	93	95,69	102,89
4	BPPP Ambon	93	96,61	103,88
5	BPPP Bitung	93	93,98	101,05

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh dokumen dan laporan untuk dapat meningkatkan aspek-aspek kinerja pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh pemenuhan dokumen dan laporan harus memiliki konsistensi kepatuhan dalam penyusunan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. SDM yang menangani pemenuhan rekonsiliasi kinerja pun telah memiliki pemahaman yang baik terkait pemenuhan IKU tersebut dengan mengikuti kegiatan pra rekonsiliasi kinerja yang diselenggarakan oleh Sekertaris BPPSDM KP. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

- **IKSK.07.04 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Adapun Komponen-komponen yang dinilai dari komponen pembentuk dari unit kerja Eselon II adalah sebagai berikut:

- PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan : Mendorong partisipasi aktif dalam berbagi pengetahuan dan Perumusan kebijakan dan studi banding pelaksanaan RB;
- PERMENPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE : Salah satu unsur penilaian SPBE (Indikator 26) dan Level 3 apabila penerapan MP menggunakan sistem aplikasi;
- Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (Corporate University) : Salah satu komponen penyelenggaraan ASN Corpu dan Terintegrasi dengan perencanaan penganggaran, pengembangan budaya organisasi, penilaian kinerja pegawai, teknologi pembelajaran, serta manajemen talenta dan pengembangan karier

Adapun Komponen-komponen yang dinilai dari komponen pembentuk dari kelompok Koordinator dan kelompok sub koordinator adalah sebagai berikut:

1. Komponen penilaian: keaktifan (100%);
2. Aplikasi *Collaboration Office*;
3. Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4;
4. Pegawai yang wajib dinilai: Eselon 2 dan Ketua Tim Kerja;

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Bitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 37. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 16. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
100,00	100,00	100,00	92,00	116,58	120,00	16,58	90,00	120,00

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan persentase capaian pada IKU manajemen pengetahuan dari tahun 2022 ke 2023 yaitu sebesar 120%, dan cenderung stabil dari tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 realisasi sebesar 100%, pada tahun 2021 realisasi sebesar 100% dan pada tahun 2022 realisasi sebesar 100%. Target IKU manajemen pengetahuan pada tahun 2023 sebesar 92% dan realisasi tahun 2023 yang telah dicapai sebesar 116,58%.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini adalah tersedianya sarana/prasarana yang memadai sehingga komponen- komponen penilaian dapat dipenuhi secara baik dan tepat waktu. Kegiatan positif yang dilakukan dalam menunjang pencapaian target IKU ini adalah telah

dilakukan sosialisasi secara berjenjang dari Eselon I dan seterusnya sampai pada level UPT. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP dimana pada IKU ini antara BPPP lingkup BPPSDM KP memiliki nilai yang sama yaitu 116,58% pada tabel dibawah ini.

Tabel 38. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	92	116,58	120,00
2	BPPP Tegal	92	116,58	120,00
3	BPPP Banyuwangi	92	116,58	120,00
4	BPPP Ambon	92	116,58	120,00
5	BPPP Bitung	92	116,58	120,00

Analisis keberhasilan pada capaian IKU ini adalah Seluruh variabel komponen terhadap penilaian MP telah terpenuhi oleh para pejabat/pelaksana dalam mendukung keberhasilan indikator ini. Terdapat efisiensi sumberdaya pada SDM bahwa dalam pelaksanaan melibatkan keaktifan pejabat dan pelaksana melalui kegiatan yang dipublish serta sharing dokumen pendukung yang dibagikan pada aplikasi <http://kinerjakp.bitrix24.com>. Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah jaringan internet yang memadai dalam media yang menshared data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi Portal Collaboration Office dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan. alam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, tim tata kelola kinerja BPPP Bitung secara rutin merekap seluruh pejabat dan operator yang tergabung pada media aplikasi Portal Collaboration Office sebelum akhir bulan berjalan pada WA grup Balai dan mengingatkan kepada pejabat dan operator yang belum mengupload data agar dapat segera mengupload pada akun masing-masing.

- **IKSK.07.05 Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas pekerjaan. IKU Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 39. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 17. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (Indeks)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
74,84	77,67	76,61	77,00	83,14	107,97	8,52	74,00	112,35

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan persentase capaian pada IKU ini dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Persentase capaian tahun 2023 terhadap target adalah 107,97%. Pada Renstra BPPP Bitung, IKU Indeks profesionalitas ASN BPPP Bitung ditargetkan dengan nilai 74 sehingga IKU ini dapat dibandingkan dengan Renstra BPPP Bitung. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 40. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (indeks)	Realisasi Capain Satker (indeks)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	77	89,48	116,21
2	BPPP Tegal	77	82,65	107,34
3	BPPP Banyuwangi	77	82,97	107,75
4	BPPP Ambon	77	85,87	111,52
5	BPPP Bitung	77	83,14	107,97

Terdapat kesesuaian target pada PK dan Renstra BPPP Bitung sehingga disesuaikan kembali pada Reviu Renstra BPPP Bitung. Analisis keberhasilan pada capaian IKU ini adalah upaya peningkatan kompetensi ASN BPPP Bitung didukung dengan keikutsertaan pada diklat dan pelatihan baik dari internal BPPP Bitung atau dari pihak luar yang mendukung tugas pokok dan fungsi. Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah dukungan seluruh pegawai di lingkup BPPP Bitung, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai.

Media sosial Whatsapp menjadi salah satu alat komunikasi untuk penyampaian pemutakhiran data, dan memonitor pergerakan nilai sehingga target IKU ini dapat tercapai. Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, namun dengan berbagai upaya target Nilai IP ASN BPPP Bitung ini diharapkan dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan secara daring. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan atau keberhasilan tercapainya target Nilai IP ASN BPPP Bitung ini antara lain disebabkan oleh:

1. Terdapat pegawai lingkup BPPP Bitung yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;
3. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
4. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan
5. Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.

● **IKSK.07.06 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung Dibandingkan Realisasi Anggaran BPPP Bitung TA. 2022 (%)**

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA 2022 (%) merupakan indikator nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Temuan dimaksud adalah temuan yang bersifat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang menurut ketentuan batas waktu penyelesaian selama 60 (enam puluh) hari. Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2022 (audited) tidak melebihi ≤ 1 % dari total realisasi anggaran BPPP Bitung Tahun 2022.

Tabel 41. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung (%)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 18. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung (%)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
0,08	≤ 1	≤ 1	$\leq 0,5$	0	120	100	$\leq 0,5$	120

Tahun 2023, target indikator Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2022 (%) adalah ≤ 1 %. Capaian IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 0% dengan persentase capaian IKU ini adalah 120%. IKU Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2022 dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 ≤ 1 %, 2021 ≤ 1 % dan tahun 2020 dengan capaian 0,08%. Analisis keberhasilan pada capaian IKU ini yaitu BPPP Bitung mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien

dan akuntabel. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya didukung oleh SDM Balai yang kompeten dibidangnya. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 42. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	≤ 0,5	0,00	120
2	BPPP Tegal	≤ 0,5	≤ 0,1	100
3	BPPP Banyuwangi	≤ 0,5	0,00	120
4	BPPP Ambon	≤ 0,5	≤ 0,1	100
5	BPPP Bitung	≤ 0,5	0,00	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah tersedianya SOP terkait penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan. Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, Progress capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

● **IKSK.07.07 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)**

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung merupakan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dari hasil audit, reviu dan evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran) ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 43. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 19. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	50,00	80,00	100,00	120,00	100,00	80,00	120,00

Berdasarkan data pada tabel diatas target Rekomendasi hasil pengawasan sebesar 80% dan realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2022 realisasi IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung adalah 50% dan mengalami kenaikan capaian sebesar 100%. Sementara itu, pada target renstra 2024 BPPP Bitung sebesar 80% dengan capaian terhadap target yaitu 120%. Pada seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara tuntas. Kegiatan positif yang dilakukan dalam menunjang pencapaian target IKU ini adalah komunikasi yang efektif dan arahan yang jelas oleh pimpinan melalui rapat monitoring kegiatan secara berkala, serta koordinasi antar pegawai dalam sub bagian maupun antar tim kerja. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 44. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capain Satker (%)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	80	80	100
2	BPPP Tegal	80	100	120
3	BPPP Banyuwangi	80	100	120
4	BPPP Ambon	80	80	100
5	BPPP Bitung	80	100	120

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi SIDAK KKP yang merupakan bagian dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkatan kompetensi operator yang menangani aplikasi SIDAK KKP sehingga progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SIDAK KKP sesuai dengan SOP turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

- **IKSK.07.08 Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)**

IKU ini merupakan IKU Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker. Nilai PM SAKIP Satker adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BRSDM.

Tabel 45. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 20. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
-	-	-	77,00	82,25	106,82	-	-	-

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023. berdasarkan data pada tabel diatas target Nilai PM SAKIP BPPP Bitung sebesar 77 dan tercapai realisasi sebesar 82,25 atau dengan persentase 107,97%. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 46. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (nilai)	Realisasi Capaian Satker (nilai)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	75	82,25	109,67
2	BPPP Tegal	70	81,20	116,00
3	BPPP Banyuwangi	77	81,50	105,84
4	BPPP Ambon	75	82,45	109,93
5	BPPP Bitung	77	82,25	109,67

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya aplikasi Kinerjaaku yang telah memuat menu template penilaian mandiri SAKIP sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2023, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM KP melalui kegiatan Kick Off Meeting Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh BRSDM KP pada tanggal 12 sampai dengan 14 April 2023
2. Dokumen penilaian mandiri SAKIP telah disusun dari awal tahun sebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan
3. Penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada Google Drive milik BPPP Bitung

- **IKSK.07.09 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)**

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung merupakan indikator nilai serapan di tahun berjalan berdasarkan target penyerapan anggaran tiap triwulan. Pengukuran nilai kinerja anggaran dilakukan dengan:

- Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target

penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah;

- Target penyerapan Tahun 2022 yakni TW 1: 15%; TW 2: 40%; TW 3: 60%; TW 4: 90%;
- Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif;
- Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik

Tabel 47. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 21. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
99,71	97,88	97,91	93,75	95,96	102,36	-1,99	89,00	107,82

Berdasarkan data pada tabel di atas target nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Bitung sebesar 95,96 dari target 93,75; sehingga persentase capaian sebesar 102,36%. IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 97,88; tahun 2020 dengan capaian 99,71; dan tahun 2022 sebesar 97,91. Pada Renstra BPPP Bitung, IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung ditargetkan sebesar 89 dengan capaian terhadap target sebesar 107,82%. Target pada Renstra dan Perjanjian Kinerja adalah sama yaitu nilai 89. Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mendukung capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan ASN BPPP Bitung yang terampil dan kompeten dibidangnya. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP.

Tabel 48. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (nilai)	Realisasi Capain Satker (nilai)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	93,75	96,54	102,98
2	BPPP Tegal	70	81,20	116,00
3	BPPP Banyuwangi	93,75	95,63	102,01
4	BPPP Ambon	93,75	91,20	97,28
5	BPPP Bitung	93,75	95,96	102,36

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi OM SPAN yang merupakan bagian dari Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Bitung. Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi OM SPAN oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

• **IKSK.07.10 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)**

Indikator Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung merupakan indikator nilai serapan di tahun berjalan berdasarkan target penyerapan anggaran tiap triwulan. Pengukuran nilai kinerja anggaran dilakukan dengan:

1. Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah;
2. Target penyerapan Tahun 2023 yakni TW 1: 15%; TW 2: 40%; TW 3: 60%; TW 4: 90%;
3. Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif;
4. Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik.

Tabel 49. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen								
IK 22. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)								
Realisasi TW IV 2020 - 2022			2023				Renstra BPPP Bitung 2020 - 2024	
2020	2021	2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	% Kenaikan TW IV 2022 - 2023	Target 2024	% Capaian Thd Target 2024
84,99	85,98	86,24	82,00	86,09	104,99	-0,17	87,00	98,95

Berdasarkan data pada tabel diatas target Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung sebesar 82 dengan realisasi sebesar 86,09; sehingga persentase capaian sebesar 104,99%. IKU Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 86,24; tahun 2021 85,98 dan tahun 2020 dengan capaian 84,99. Pada Renstra BPPP Bitung, IKU Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung ditargetkan sebesar 87 sehingga IKU ini dapat dibandingkan dengan Renstra BPPP Bitung. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP.

Tabel 50. Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (nilai)	Realisasi Capain Satker (nilai)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	82	86,30	105,24
2	BPPP Tegal	82	88,36	107,76
3	BPPP Banyuwangi	82	85,65	104,45
4	BPPP Ambon	82	82,42	100,51
5	BPPP Bitung	82	86,09	104,99

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya aplikasi SMART DJA yang merupakan bagian dari Nilai kinerja anggaran BPPP Bitung. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2023, BPPP Bitung melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023

3.3.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran lingkup BPPP Bitung berdasarkan data laporan realisasi SP2D TA per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 56.406.571.370,- atau 99,65% dari total pagu tahun 2023 yaitu sebesar Rp56.607.073.000,-. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 51. Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023 BPPP Bitung

No.	Sasaran Kinerja	No.	Indikator	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi %
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usahadan Dunia Industri di BPPP Bitung (%)	540,000,000	534,413,683	98.97
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	1,900,000,000	1,883,196,336	99.12
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	90,000,000	83,238,820	92.49
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)	54,000,000	53,611,473	99.28
3	Terselenggaranya Kaji TerapPelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Bitung (orang)	17,264,000	17,264,000	100.00
		6	Materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Bitung (paket)	102,736,000	98,958,285	96.32
4	Terselenggaranya PenyuluhanKelautan dan Perikanan	7	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluhdi BPPP Bitung (kelompok)	5,388,405,000	5,370,104,996	99.66
		8	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung (kelompok)	75,010,000	74,735,000	99.63
		9	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung (kelompok)	520,425,000	519,743,105	99.87
		10	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung (orang)	58,000,000	57,822,109	99.69

5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	135,000,000	128,200,066	94.96
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Bitung (unit)	511,500,000	511,425,983	99.99
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen	13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	4,001,526,000	3,913,129,849	97.79
		14	Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	253,000,000	228,840,739	90.45
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai)	51,300,000	48,617,733	94.77
		16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)	10,694,217,750	10,687,896,493	99.94
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	10,694,217,750	10,687,896,493	99.94
		18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2022 (%)	10,694,217,750	10,687,896,493	99.94
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	10,694,217,750	10,687,896,493	99.94
		20	Nilai PM SAKIP BPPP Bitung (nilai)	70,262,000	70,101,800	99.77
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	14,638,000	14,512,844	99.14
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)	47,136,000	47,068,577	99.86
TOTAL				56,607,073,000	56,406,571,370	99.65

3.3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di BPPP Bitung

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, salah satu instrument penilaian kinerja Lembaga adalah Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Terdapat empat instrumen yang digunakan untuk mengukur Nilai Kinerja Anggaran (NKA), yaitu variabel capaian keluaran, realisasi anggaran, efisiensi, dan konsistensi rencana penarikan dana.

Alat Ukur Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Berdasarkan peraturan ini, terdapat dua unsur penting dalam penilaian kinerja anggaran. Pertama, variabel penilaian kinerja anggaran Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 22/PMK.02/2021 menyebutkan bahwa variabel yang digunakan untuk mengukur nilai kinerja anggaran adalah capaian output; penyerapan anggaran; efisiensi; dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk mengukur nilai kinerja anggaran saat ini adalah SMART DJA. Berdasarkan hasil pengukuran nilai kinerja anggaran pada SMART DJA, BPPP Bitung memperoleh nilai SMART 86,09 (baik). Nilai tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 5. Aplikasi yang digunakan untuk mengukur nilai kinerja anggaran

Sumber : monev.kemenkeu.go.id

Efisiensi sumber daya pada BPPP Bitung dapat dihitung dengan cara selisih dari presentase capaian kinerja dikurangi dengan presentase realisasi anggaran. Efisiensi sumber daya dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 52. Efisiensi Anggaran Per 31 Desember 2023 BPPP Bitung

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi %	Efisiensi (%)
Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung (%)	100,40%	540,000,000	534,413,683	98.97	1,43
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	105,03%	1,900,000,000	1,883,196,336	99.12	5,91
	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	120%	90,000,000	83,238,820	92.49	27,51

Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)	120%	54,000,000	53,611,473	99.28	20,72
Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Bitung (orang)	120%	17,264,000	17,264,000	100.00	20,00
	Materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Bitung (paket)	100%	102,736,000	98,958,285	96.32	3,68
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Bitung (kelompok)	100%	5,388,405,000	5,370,104,996	99.66	0,34
	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung (kelompok)	107,37%	75,010,000	74,735,000	99.63	7,74
	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung (kelompok)	119,93%	520,425,000	519,743,105	99.87	20,06
	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung (orang)	100,85%	58,000,000	57,822,109	99.69	1,16
Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok)	100%	135,000,000	128,200,066	94.96	5,04
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Bitung (unit)	100%	511,500,000	511,425,983	99.99	0,01
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100%	4,001,526,000	3,913,129,849	97.79	2,21
	Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	100%	253,000,000	228,840,739	90.45	9,55
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai)	101,05%	51,300,000	48,617,733	94.77	6,28
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)	120%	10,694,217,750	10,687,896,493	99.94	20,06
	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	107,97%	10,694,217,750	10,687,896,493	99.94	8,03
	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2022 (%)	120%	10,694,217,750	10,687,896,493	99.94	20,06

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	120%	10,694,217,750	10,687,896,493	99.94	20,06
Nilai PM SAKIP BPPP Bitung (nilai)	106,82%	70,262,000	70,101,800	99.77	7,05
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	102,36	14,638,000	14,512,844	99.14	3,22
Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)	104,99	47,136,000	47,068,577	99.86	5,13
		56,607,073,000	56,406,571,370	99.65	4,52

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada BPPP Bitung yaitu;

1. Perencanaan, efisiensi anggaran dilakukan BPPP Bitung dalam beberapa dimensi, yaitu:

Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya. Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2022 BPPP Bitung telah menetapkan kegiatan prioritas yang pengawalannya dilakukan secara rutin (weekly report) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai. Dimensi efisiensi ketiga berupa pemangkasan alokasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan. dialihkan kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal ini dukungan untuk prioritas nasional/KKP dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Disamping itu, pada masa pandemi Covid-19, pos-pos anggaran yang tercatat berlebih diantaranya belanja pegawai dialihkan untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya.

2. Pelaksanaan, strategi pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi terutama dalam hal perjalanan dinas/paket meeting, sehingga volume capaian dapat melebihi target atau dipergunakan untuk output baru. Implementasi efisiensi ini diantaranya berupa:

- a. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan berbasis daring;
- b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan evaluasi dilaksanakan secara daring dan blended (tatap muka dan daring);
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui video conference dan live streaming;
- d. Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan pimpinan berbasis SKP;
- e. Membayarkan biaya operasional Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai kinerja yang dilaporkan dan sepengetahuan Kepala Dinas KP sebagai pengguna.
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung program prioritas Eselon I KKP.

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- a. Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran agar tepat Penggunaan dan sesuai aturan perundang-undangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev, Bappenas, E- Dalwas KKP, Kinerjaku KKP, E-Pegawai KKP, serta Dashboard dan Weekly Report BPPP Bitung;
- b. Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.

4. Penyesuaian

Pelaksanaan revisi indikator, target/volume kinerja dan anggaran dilakukan bila dari hasil reuiu diperlukan perubahan, penambahan, dan pergeseran bila diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. BPPP Bitung melakukan beberapa penyesuaian diantaranya melakukan proses identifikasi dan revisi.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Bitung Tahun 2023 yaitu 108.33%.



Gambar 6. Nilai Kinerja Organisasi BPPP Bitung

Sumber : web.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian kinerja yang dicapai di ini yaitu pada 7 Sasaran Strategis dan 22 indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
 - Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri(%) sebanyak 70,28% dari target 70% atau dengan persentase 100,4%
 - Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang) sebanyak 3.130 orang dari target 2.980 orang atau dengan persentase 105,03%;
 - Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar) tercapai sebesar 0,42 Miliar Rupiah dari target yaitu sebesar 0,188 Miliar Rupiah atau dengan persentase 120%.
2. Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
 - SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang) tercapai sebanyak 108 orang dari target 90 orang atau dengan persentase 120%.
3. Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP adalah sebagai berikut :
 - Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) di BPPP Bitung (Orang) sebanyak 20 orang dari target 16 orang dengan persentase 120%;

- Materi pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Bitung (Paket) sebanyak 2 paket dari target 2 paket dengan persentase 100%.
4. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
- Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 3.450 kelompok dari target 3.450 kelompok ataudengan persentase 100%;
 - Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 102 kelompok dari target 95 kelompok atau dengan persentase 107,37%;
 - Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 361 kelompok dari target yaitu 301 kelompok atau dengan persentase 119,93%;
 - Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung (orang) sebanyak 1.070 orang dari target 1.061 orang atau dengan persentase 100,85%.
5. Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP adalah sebagai berikut :
- Kelompok masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Kelompok) sebanyak 1 kelompok dari target 1 kelompok atau dengan persentase 100%.
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
- Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP yang terstandar (unit) sebanyak 2 unit dari target 2 unit atau dengan persentase 100%.
7. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker adalah sebagai berikut:
- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) tercapai 100% dari target 100% atau dengan persentase capaian 100%;
 - Unit Kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker) tercapai 1 Satker dari target 1 Satker atau dengan persentase capaian 100%;
 - Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai) mencapai nilai 93,98 dari nilai target 93 atau dengan persentase capaian 101,05%;
 - Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%) tercapai 116,58% dari target 92% atau dengan persentase 120%;
 - Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) tercapai 83,14 dari target 77 atau dengan persentase capaian 106,82%;
 - Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung (%) tercapai 0% dari target 0,5% atau dengan persentase capaian 120%;
 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) tercapai 100% dari target 80% atau dengan persentase capaian 120%;
 - Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) tercapai 82,25 dari target 77 atau dengan persentase capaian

106,82%;

- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) tercapai 95,96 dari target 93,75 dengan persentase capaian 102,36%;
- Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai) tercapai 86,09 dari target 82 atau dengan persentase capaian 104,99%.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Capaian kinerja BPPP Bitung tahun 2023 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian sebesar 108.33%. Bertitik tolak dari capaian ini, ada beberapa rekomendasi dan perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan rapat setiap minggu untuk memonitor dan memvalidasi data dukung capaian kinerja masing-masing IKU sehingga menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan capaian target IKU.
2. Perlu dilakukan monitoring rutin terhadap IKU Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri terutama terhadap profil kelompok.
3. Perlu dilakukan monitoring terhadap penyuluh untuk lebih memahami tentang petunjuk teknis dan keseragaman data dukung apa saja yang dibutuhkan pada IKU penyuluhan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Natalia
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Lilly Aprilya Pregiwati
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Desember 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung

Natalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Bitung (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	2.980
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	0,188
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)	90
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Bitung (orang)	16
		6	Materi pelatihan berbasis kaji widya di BPPP Bitung (paket)	2
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh di BPPP Bitung (kelompok)	3.450
		8	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Bitung (kelompok)	95
		9	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang dibentuk di BPPP Bitung (kelompok)	301
		10	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPP Bitung (orang)	1.061
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP lingkup BPPP Bitung (Desa Perikanan Cerdas)	1
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12	Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Bitung(unit)	2
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen	13	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100

No.	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14	Unit kerja BPPP Bitung yang dibangun untuk diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Satker)	1
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Bitung (Nilai)	93
		16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Bitung (%)	92
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	77
		18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Bitung dibandingkan realisasi anggaran BPPP Bitung TA. 2022 (%)	≤ 0,5
		19	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	80
		20	Nilai PM SAKIP BPPP Bitung (nilai)	77
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	93,75
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Bitung (nilai)	82

Data Anggaran

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 9.392.340.000
2	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPSDM KP	Rp 47.214.733.000
Total Anggaran BPPP Bitung		Rp 56.607.073.000

Jakarta, 4 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung



Lilly Aprilya Pregiwati



Natalia



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA
BITUNG 95526 KOTAK POS 18/Bt BITUNG 95501
TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAN sekretariat@bpppbitung.com

SURAT TUGAS

Nomor : B.94a/BPPP.BTG/TU.140/I/2023

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pelatihan dan penyuluhan di BPPP Bitung, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yaitu mulai dari tahap perencanaan, pemantauan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, dan tahap evaluasi sampai dengan tahap penyusunan laporan kinerja atas capaian kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu menunjuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Tahun 2023;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam dalam keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang perubahan keenam atas Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-032.12.2.239260/2023 tanggal 30 November 2022;
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2023

MEMBERI TUGAS

- Kepada : Pegawai sebagaimana terlampir (Lampiran I)
- Sebagai : Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
- Dengan Tugas :
1. Pengarah dan Penanggung Jawab

Memberikan arahan dan bimbingan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam penyusunan laporan kinerja atas kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
 2. Ketua Tim Teknis Tata Kelola Kinerja
 - a. Melakukan Koordinasi, Pengendalian dan Pendampingan dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi data dukung capaian kinerja pelatihan dan penyuluhan KP
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim dalam rangka penyusunan laporan kinerja

3. Sekretaris Tim Teknis Tata Kelola Kinerja
 - a. Melakukan pemantauan dan mengidentifikasi permasalahan dalam setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP secara triwulanan dan tahunan;
 - b. Melakukan pengukuran evaluasi atas pencapaian kinerja pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan KP sesuai rencana kinerja secara berkala, baik bulanan, triwulanan dan tahunan;
 - c. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan KP sesuai rencana kinerja secara berkala, baik bulanan, triwulanan dan tahunan;
 - d. Melakukan pelaporan atas hasil pemantuan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP terhadap rencana kinerja tahun 2022 dengan membuat dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan dan Tahunan.
4. Penanggung Jawab Data Capaian IKU
 - a. Melakukan Koordinasi terkait Verifikasi dan Validasi data capaian kinerja;
 - b. Melakukan Verifikasi dan Validasi data capaian kinerja secara berkala, baik bulanan, triwulanan dan tahunan.

Biaya : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPABPPP Bitung Tahun Anggaran 2023

Keterangan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini, makaskan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bitung, 20 Januari 2023
Kepala Balai,



Ahmad Ridloudin, S.T., M.P.
NIP. 19790515 200502 1 001

Lampiran I
Nomor : B. 94a/BPPP.BTG/TU.140/III/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

**DAFTAR NAMA TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA BALAI
PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2023**

Pengarah dan Penanggung Jawab	:	Kepala Balai
Ketua	:	Merlyn Diana Manurung, S.St.Pi., M.Si
Sekretaris	:	Adi Kuswoyo, S.Pi
Penanggung Jawab Data Capaian IKU Pelatihan	:	Pungky Herlembeng, A.Md., S.Tr.Pi
Penanggung Jawab Data Capaian IKU Penyuluhan	:	Leady J. E. Pangkole, S.H., M.H.
Penanggung Jawab Data Capaian IKM	:	Sri Widiyanti, S.Pi

Bitung, 20 Januari 2023
Kepala Balai,



Ahmad Ridloudin, S.T., M.P.
NIP. 19790515 200502 1 001

